

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG BERBENTUK BUMN/BUMD DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

RIZAL JAMALUDIN

ABSTRAK

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh agen-agensinya, yang dikenal dengan istilah “actus reus” yang berarti bahwa perbuatan dilakukan harus dalam lingkup kekuasaannya. Besarnya nilai proyek pada BUMN/BUMD akan berdampak pada kejahatan korporasi telah banyak merugikan masyarakat, dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi kebanyakan berskala besar dan korban yang lebih banyak. Kejahatan pada BUMN/BUMD pada umumnya adalah tindak pidana korporasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD? 2. Bagaimana realisasi, hambatan dan solusi dalam dalam pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD. 2. Menganalisis bentuk realisasi, hambatan dan solusi dalam dalam pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD. Dengan metode penelitian yuridis dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD dapat dijatuhkan pidana pengganti. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya atau orang lain yang terkait dengan korporasi. Sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, dapat saja dijatuhkan hakim, tapi terbatas pada perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak dan pembayaran uang pengganti sebesar yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Realisasi, hambatan dan solusi dalam dalam pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD sebagai berikut: a. Realisasi yaitu dalam kasus korupsi maskapai Garuda Indonesia, kasus korupsi proyek pengadaan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, proyek pembangunan Dermaga Sabang pada kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang dan dalam kasus korupsi KTP-elektronik. 3. Hambatan yaitu pertama konsep pemikiran dalam UUPTPK, sebagian besar merupakan konsep pemikiran KUHPidana, karena konsep pemikiran yang terkandung dalam KUHPidana hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum, tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Solusi adalah diatur tata cara dan prosedur penanganannya dalam hukum acara pidana yang mendatang, ketika korporasi sebagai subjek hukum pidana dan melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Korupsi

JURIDICAL REVIEW OF CORPORATE LIABILITY IN THE FORM OF BUMN / BUMD IN CORRUPTION CRIME

RIZAL JAMALUDIN

ABSTRACT

Corporations can be held accountable of what their agents have done, known as "actus reus" which means that the act done must be within the scope of his power. The magnitude of the project value of state-owned enterprises / BUMDs will have an impact on corporate crime, which has caused much harm to the public, due to the crimes committed by large-scale corporations and the greater number of victims. Crime on BUMN / BUMD in general is a corporate crime. Problems in this research are 1. How to form of criminal responsibility in a corporate crime in the form of BUMN / BUMD? 2. How is the realization, obstacles and solutions in the criminal responsibility in a corporate crime in the form of BUMN / BUMD? The purpose of this study is 1. To analyze the form of criminal responsibility in a corporate crime in the form of BUMN / BUMD. 2. Analyzing the form of realization, obstacles and solutions in the criminal responsibility in a corporate crime in the form of BUMN / BUMD. With juridical research method can be concluded that 1. The form of criminal responsibility in a corporate crime in the form of BUMN / BUMD can be imposed a criminal substitute. If a criminal act of corruption is committed in the name of a corporation, then a criminal penalty may be imposed on the corporation or its management or any other person in connection with the corporation. Additional criminal sanctions as stipulated in Article 18 paragraph (1) a and b, may be imposed by a judge, but limited to the seizure of tangible or intangible goods or immovable property and the payment of substitute money as much as the proceeds of a criminal act of corruption. Realization, obstacles and solutions in the criminal liability in a corporate crime in the form of BUMN / BUMD as follows: a. The realization is in the case of Garuda Indonesia airline corruption, corruption case of procurement project of Center for Education, Training and School of National Sports (P3SON) Hambalang, Sabang Port development project at Sabang Free Port and Trade area and in case of electronic ID card corruption. 3. Obstacles namely the first concept of thought in UUPTPK, most of the concept of KUHP thought, because the concept of thought contained in the Criminal Code only know humans as legal subjects, do not know the corporation as a legal subject. Solutions are governed by procedures and procedures for handling them in the upcoming criminal procedural law, when the corporation is subject to criminal law and commits a crime.

Keywords : Accountability, Corporations, Corruption